



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI  
B I D A N G  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,  
INVESTASI, DAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

---

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 22
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 22 Februari 2010
W a k t u	: Pukul 09.30 s/d 13.35 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
A c a r a	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penjelasan Menteri Koperasi dan UKM atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI. 3. Tanya Jawab 4. Penutup
Ketua Rapat	: Ir. H. Airlangga Hartarto, MMT, MBA, didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (Aria Bima, dan Ir.Nurdin Tampubolon)
Sekretaris Rapat	: Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset Komisi VI)
Hadir	: A. Menteri Koperasi dan UKM RI beserta jajaran B. 43 orang dari 52 orang Anggota.

**KESIMPULAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM dibuka pada pukul 09.30 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan sifat rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa Rapat Kerja kali ini agenda utamanya adalah Rapat Kerja Lanjutan tanggal 2 Desember 2009.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan Menteri Koperasi dan UKM untuk menyampaikan penjelasan atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR RI untuk menanggapi atas penjelasan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memonitor capaian dari Bank Pelaksana KUR serta melakukan evaluasi untuk mendorong Bank Pelaksana KUR agar dapat menurunkan tingkat suku bunga.
2. Komisi VI DPR RI meminta agar kebijakan *One Village One Product* (OVOP) lebih diperjelas dengan *roadmap* Kementerian Koperasi dan UKM sehingga perincian jumlah target daerah, produk unggulan per daerah, serta target tenaga kerja yang dapat dipekerjakan menjadi lebih fokus.
3. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk mempercepat program penjaminan simpanan masyarakat melalui Pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk segera mengajukan kepada DPR RI:
  - a. Draft RUU Lembaga Keuangan Mikro serta Naskah Akademik Lembaga Keuangan Mikro,
  - b. Draft Revisi Undang-Undang tentang Koperasi serta Naskah Akademik Revisi Undang-Undang tentang Koperasi.
5. Komisi VI DPR RI mendukung upaya pemberdayaan UMKM/pedagang pasar tradisional dengan melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional yang diprogramkan Kementerian Koperasi dan UKM dalam Tahun Anggaran 2010.
6. Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dalam mencari langkah terobosan pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang saat ini dikelola oleh Kementerian BUMN.
7. Komisi VI DPR RI mendukung program pemberian kredit usaha bagi sarjana serta meminta Pemerintah cq. Kementerian Koperasi dan UKM untuk melaksanakan Konsep Perluasan Program Diklat dan Pendidikan Vocational bagi pelaku UKM sebagaimana tertuang dalam Bab VI Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

## III. PENUTUP

Rapat Kerja ditutup pada pukul 13.35 WIB.

Jakarta, 22 Februari 2010

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,

  
IR. H. AIRLANGGA HARTARTO, MMT, MBA  
No. A-212